



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

LAPORAN KEUANGAN UAKPA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WIL. III

TAHUN 2025 (AUDITED)
YANG PERIODE YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2025

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



otban_wil3@kemenhub.go.id

031-8677604

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

@otban3Surabaya



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III**

GEDUNG AIRPORT AUTHORITY
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA
SIDOARJO – JAWA TIMUR
61253

TELEPON : (031) 8677604
FAX : (031) 8677617
EMAIL : otban_wil3@kemenhub.go.id

Nomor : KU.204/468/KOBU.III/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Tahun 2025 Audited

Sidoarjo, 4 Mei 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Tipe A1 Sidoarjo
di
Sidoarjo

Mendasari Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor S-1903/WPB.16/2026 Tanggal 08 April 2026 perihal Penegasan Atas Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 Audited, dengan ini disampaikan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kantor Otoritas Bandar Wilayah III (465657) Tahun 2025 Audited beserta dokumen pendukungnya sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah III



Agustono
NIP. [REDACTED]



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Tahun Anggaran 2025 Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 4 Mei 2026
Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah III



Agustono
NIP. 19690831 199103 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	62
VI. Lampiran	63



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

GEDUNG AIRPORT AUTHORITY
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA
SIDOARJO – JAWA TIMUR
61253

TELEPON : (031) 8677604
FAX : (031) 8677617
EMAIL : otban_wil3@dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Tahun Anggaran 2025 Audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 4 Mei 2026

Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah III



Agustono

NIP. [REDACTED]



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Tahun Anggaran 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 65.018.884.584 atau mencapai 1.640,09 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 3.964.353.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 48.143.757.144 atau mencapai 78,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 61.707.284.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.790.663.111.003 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 204.411.718; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 14.655.624.304.485; Properti Investasi sebesar Rp. 134.834.394.800; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 42.649.838.179 dan Rp. 14.748.013.272.824.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,



surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 23.139.865.229, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 49.428.487.511 sehingga terdapat **Defisit** dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 26.288.622.282). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 136.611.725 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami **Defisit-LO** sebesar (Rp. 26.152.010.557).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 14.790.387.728.274 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp. 26.152.010.557) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp. 16.428.823.923) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 14.748.013.272.824.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025 ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	TA 2024 REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.964.353.000	65.018.884.584	1.640,09	4.095.998.939
JUMLAH PENDAPATAN		3.964.353.000	65.018.884.584	1.640,09	4.095.998.939
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	27.978.640.000	27.625.328.448	98,74	24.498.297.331
Belanja Barang	B.2.2	32.608.844.000	19.401.877.809	59,50	27.058.467.420
Belanja Modal	B.2.3	1.119.800.000	1.116.550.887	99,71	1.214.937.777
JUMLAH BELANJA		61.707.284.000	48.143.757.144	78,02	52.771.702.528

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. NERACA

NERACA			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	204.411.718	40.819.428
Jumlah Aset Lancar		204.411.718	40.819.428
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	14.607.251.025.717	14.606.804.722.200
Peralatan dan Mesin	C.16	52.388.100.989	51.271.550.102
Gedung dan Bangunan	C.17	53.451.311.896	53.451.311.896
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.18	1.105.102.330	1.105.102.330
Aset Tetap Lainnya	C.19	1.899.130.864	1.899.130.864
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(60.470.367.311)	(58.111.872.797)
Jumlah Aset Tetap		14.655.624.304.485	14.656.419.944.595
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.22	134.834.394.800	134.834.394.800
Jumlah Properti Investasi		134.834.394.800	134.834.394.800
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.23	-	-
Aset Tak Berwujud	C.24	1.339.219.000	1.339.219.000
Aset Lain-lain	C.25	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.26	(1.339.219.000)	(1.339.219.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		14.790.663.111.003	14.791.295.158.823
KEWAJIBAN			
Uang Muka dari KPPN	C.27	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.28	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.29	42.649.838.179	907.430.549
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.30	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		42.649.838.179	907.430.549
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	14.748.013.272.824	14.790.387.728.274
JUMLAH EKUTAS		14.748.013.272.824	14.790.387.728.274
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.790.663.111.003	14.791.295.158.823

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024			
(Dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	23.139.865.229	3.071.800.148
Jumlah Pendapatan		23.139.865.229	3.071.800.148
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	27.625.328.448	24.498.297.331
Beban Persediaan	D.3	217.890.830	401.729.721
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.580.278.399	10.868.746.698
Beban Pemeliharaan	D.5	4.342.593.923	3.809.135.782
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8.303.901.397	11.953.684.988
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.358.494.514	2.790.059.093
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		49.428.487.511	54.321.653.613
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(26.288.622.282)	(51.249.853.465)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset	D.11	-	15.312.344
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	136.611.725	101.455.898
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		136.611.725	116.768.242
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(26.152.010.557)	(51.133.085.223)
Pos Luar Biasa	D.13	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(26.152.010.557)	(51.133.085.223)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	14.790.387.728.274	14.804.933.979.820
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(26.152.010.557)	(51.133.085.223)
KOREKSI YANG	E.3		
MENAMBAH/MENGURANGI		206.379.030	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	206.379.030	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(16.428.823.923)	36.586.833.677
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(42.374.455.450)	(14.546.251.546)
EKUITAS AKHIR	E.5	14.748.013.272.824	14.790.387.728.274

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III

<i>Dasar</i>	Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41
<i>Hukum</i>	Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
<i>Entitas dan</i>	Otoritas Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara
<i>Rencana</i>	Wilayah III merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
<i>Strategis</i>	lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011, wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III meliputi seluruh bandar udara umum dan khusus baik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) maupun yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yang terletak di propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III berkomitmen dengan visi “terwujudnya pelayanan transportasi udara yang menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan pada Bandar Udara” Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:



- Meningkatkan pengawasan kegiatan operasional di bidang pengawasan keamanan, pengamanan fasilitas dan jasa bandara, pengawasan fasilitas dan peralatan bandara, pengawasan KKOP dan rencana induk bandara, pengawasan AMDAL, BKK, dan DLK bandara, pengawasan ijin terbang/FA, pengawasan pelaksanaan rute penerbangan dan pengawasan hak angkut.
- Meningkatkan mutu pelayanan di bidang jasa transportasi udara.
- Mengembangkan potensi personil / SDM.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh



tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.



- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir SM tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap SM selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas



dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.



Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 14 kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan pagu anggaran dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pend. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000
Pend. Dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	414.753.000	414.753.000
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	3.184.200.000	3.184.200.000
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	165.400.000	165.400.000
Jumlah Pendapatan	3.964.353.000	3.964.353.000
Belanja		
Belanja Pegawai	28.331.860.000	27.978.640.000
Belanja Barang	33.084.283.000	32.608.844.000
Belanja Modal	0	1.119.800.000
Jumlah Belanja	61.416.143.000	61.707.284.000

Realisasi

Pendapatan

Rp.

65.018.884.58

4

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 65.018.884.584 atau mencapai 1.640,09% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.964.353.000. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:



Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pend. Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200.000.000	61.774.847.237	30.887,4
Pend. dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	414.753.000	414.752.678	100,0
Pend. Penggunaan Sarana & Prasarana Tusi	-	189.832.944	-
Pend. Jasa Kebandarudaraan	3.184.200.000	2.282.790.000	71,7
Pend. Jasa Transportasi Lainnya	165.400.000	220.050.000	133,0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	3.124	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	136.608.601	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah	3.964.353.000	65.018.884.584	1.640,09

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 65.018.884.584 dan Rp. 4.095.998.939. Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 1.487,38% dibandingkan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan pendapatan terutama dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar 6.653,88%, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 376,95%, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar 34,65%.

Akan tetapi, Pendapatan Jasa Kebandarudaraan serta Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 7.96%, dan 0% dibandingkan tahun sebelumnya.



Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pend. Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	15.312.344	0,00
Pend. Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	61.774.847.237	914.656.756	6653,88
Pend. dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	414.752.678	402.828.941	2,96
Pend. Penggunaan Sarana & Prasarana Tusi	189.832.944	-	0,00
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2.282.790.000	2.480.145.000	(7,96)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	220.050.000	181.600.000	21,17
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	3.124	655	376,95
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	136.608.601	101.455.243	34,65
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah	65.018.884.584	4.095.998.939	1487,38

Realisasi

Belanja

Negara Rp.

48.143.757.14

4

B.2 Belanja

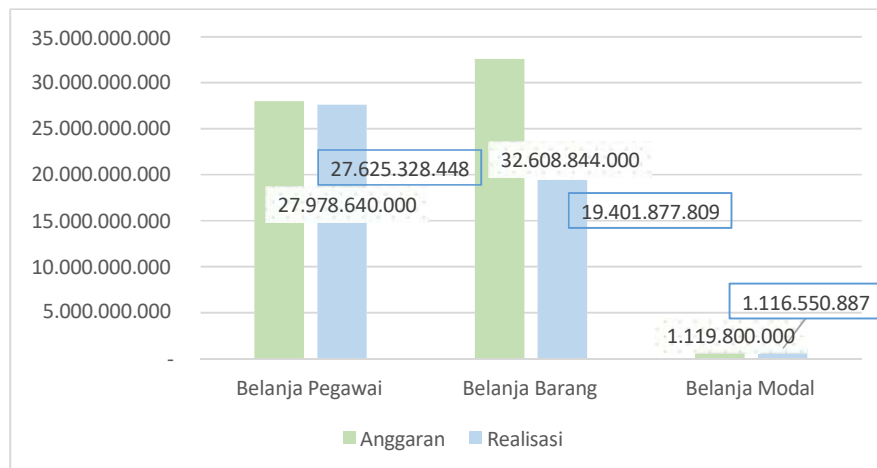
Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 48.143.757.144 atau 78,02 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 61.707.284.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	27.978.640.000	27.625.328.448	98,74
Belanja Barang	32.608.844.000	19.401.877.809	59,50
Belanja Modal	1.119.800.000	1.116.550.887	99,71
Jumlah	61.707.284.000	48.143.757.144	78,02



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 8,77%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan pada awal Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025. Meskipun demikian belanja pegawai mengalami peningkatan akibat adanya tambahan pegawai PPPK serta adanya pegawai pindahan.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	27.625.328.448	24.498.297.331	12,76
Belanja Barang	19.401.877.809	27.058.467.420	(28,30)
Belanja Modal	1.116.550.887	1.214.937.777	(8,10)
Jumlah	48.143.757.144	52.771.702.528	(8,77)

*Belanja
Pegawai Rp.*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar



27.625.328.44 8 Rp. 27.625.328.448 dan Rp. 24.498.297.331. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 12,76% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya penerimaan pegawai PPPK sehingga pada beberapa belanja pegawai khususnya PPPK menjadi meningkat drastis, diantaranya belanja gaji pokok PPPK, belanja pembulatan gaji PPPK, belanja tunjangan beras PPPK, belanja uang makan PPPK, dan belanja tunjangan khusus/kinerja PPPK. Disamping pegawai PPPK, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III juga menerima beberapa pegawai pindahan di tahun 2025.



Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	8.517.149.920	8.055.391.660	5,73
Belanja Pembulatan Gaji PNS	116.217	126.274	- 7,96
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	547.168.090	517.483.810	5,74
Belanja Tunj. Anak PNS	176.474.566	168.413.220	4,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	106.195.000	106.750.000	- 0,52
Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.560.000	9.000.000	- 16,00
Belanja Tunj. PPh PNS	46.097.956	59.273.802	- 22,23
Belanja Tunj. Beras PNS	451.900.800	435.839.720	3,69
Belanja Uang Makan PNS	1.150.298.000	1.002.723.000	14,72
Belanja Tunjangan Umum PNS	419.700.000	405.195.000	3,58
Belanja Gaji Pokok PPPK	283.257.100	47.816.900	492,38
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.124	888	364,41
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	14.971.810	-	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	4.339.874	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	7.560.000	8.100.000	- 6,67
Belanja Tunj. Beras PPPK	15.425.460	1.066.300	1.346,63
Belanja Uang Makan PPPK	64.439.000	8.399.000	667,22
Belanja Tunj. Umum PPPK	14.645.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	15.440.031.937	13.606.731.817	13,47
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	357.993.899	69.726.350	413,43
Jumlah Belanja kotor	27.625.328.753	24.502.037.741	12,75
Pengembalian Belanja Pegawai	305	3.760.410	(99,99)
Jumlah Belanja	27.625.328.448	24.498.277.331	12,76

Belanja

Barang Rp.

19.401.877.80

9

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.401.877.809 dan Rp. 27.058.467.420. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 28,30% dari Realisasi Tahun Anggaran 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi belanja anggaran oleh pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025, surat Menteri Keuangan Nomor S-



37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Efisiensi Belanja K/L Dalam Pelaksanaan APBN TA. 2025, serta diperkuat oleh surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 Perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L Dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 yang menyebabkan penurunan daya serap anggaran di semua jenis belanja barang di Tahun 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	3.852.329.948	4.200.108.142	(8,28)
Belanja Barang Non Operasional	619.065.633	3.296.952.341	(81,22)
Belanja Barang Persediaan Barang	364.233.514	571.968.582	(36,32)
Belanja Jasa	2.108.882.818	3.410.516.818	(38,17)
Belanja Pemeliharaan	4.153.464.499	3.664.067.152	13,36
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.306.214.897	11.937.813.058	(30,42)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	15.871.930	-
Jumlah Belanja Kotor	19.404.191.309	27.097.298.023	(28,39)
Pengembalian Belanja	2.313.500	38.830.603	(100,00)
Jumlah Belanja	19.401.877.809	27.058.467.420	(28,30)

Belanja Modal

Rp.

1.116.550.887

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.116.550.887 dan Rp. 1.214.937.777 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.116.550.887	700.277.346	59,44
Belanja Modal Gedung dan	-	298.558.098	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	1.116.550.887	998.835.444	11,79
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.116.550.887	998.835.444	11,79

*Belanja Modal
Tanah
Rp. 0*

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing - masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.
1.116.550.887*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 1.116.550.887 dan Rp. 717.152.300 mengalami peningkatan sebesar 55,69% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 berupa Pengadaan Alat Uji Airport Pavement Management System, Pengadaan Meubelair Layanan, Pengadaan Alat Uji Mutu Foam, serta Pengadaan Peralatan Inspektur/Pengawasan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.116.550.887	717.152.300	55,69
Jumlah Belanja Kotor	1.116.550.887	717.152.300	55,69
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.116.550.887	717.152.300	55,69



*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp. 0*

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 497.785.477.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024	%
Belanja Modal Gedung dan	-	298.540.153	-
Belanja Penambahan Nilai	-	199.245.324	-
Jumlah Belanja Kotor	-	497.785.477	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	497.785.477	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran baik kas di bank maupun kas tunai di bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Kas di Bank (8100124656571000)	-	-
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.



*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan TA 2024*

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Uang Tunai	-	-
Bank BERSAMA No.acc 0	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp. 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2025 dan TA 2024*

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Uang Muka
Belanja
(Prepayment)
Rp. 0*

C.4 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :



*Rincian Belanja Dibayar Dimuka
TA 2025 dan 2024*

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Uang Muka Beban Pegawai (prepayment)	-	-
Jumlah	-	-

Piutang

Bukan Pajak

Rp. 0

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Umumnya Piutang Bukan Pajak pada Kantor Otoritas Bandara Wilayah III bersumber dari potongan gaji (sewa rumah dinas) yang akan dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2025 dan TA 2024*

Uraian	TA. 2025	TA. 2024
Sewa Rumah Dinas	-	-
Jumlah	-	-

Bagian

Lancar

Tagihan

TP/TGR

Rp. 0

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau



kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 2025 dan TA 2024*

No	Nama	TA. 2025	TA. 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian
Lancar TPA
Rp. 0*

C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
TA 2025 dan TA 2024*

No	Nama	TA. 2025	TA. 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp. 0*

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.9 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak



yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
TA 2025 dan TA 2024*

Jenis	TA. 2025	TA. 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Tanah	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan

yang Masih

Harus

Diterima Rp. 0

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2025 dan TA 2024*

Jenis	TA. 2025	TA. 2024
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp

204.411.718

C.11 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 204.411.718 dan Rp. 40.819.428.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,



dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan
TA 2025 dan TA 2024*

Jenis	TA. 2025	TA. 2024
Barang Konsumsi	203.794.984	40.819.428
Barang untuk Pemeliharaan	616.734	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	204.411.718	40.819.428

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

**C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



*Rincian Tagihan TP/TGR
TA 2025 dan TA 2024*

No	Nama	TA. 2025	TA. 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0*

C.13 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA
TA 2025 dan TA 2024*

No	Nama	TA. 2025	TA. 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp. 0*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan



Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Piutang/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.

14.607.251.02

5.717

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 14.607.251.025.717 dan Rp. 14.606.804.722.200. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.606.804.722.200
Mutasi tambah:	
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	446.303.517
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	14.607.251.025.717



Terdapat mutasi tambah Tanah yang berasal dari transfer masuk berupa Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi sebesar Rp. 446.303.517 yang dilakukan oleh Kantor BMKG Juanda Surabaya di atas tanah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III yang di pinjam pakai oleh Kantor BMKG Juanda Surabaya. Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
52.388.100.98
9*

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 52.388.100.989 dan Rp. 51.271.550.102. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	51.271.550.102
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.116.550.887
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	52.388.100.989
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(48.712.053.421)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.676.047.568

Nilai mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian Alat Uji Pavement Management System 1 dummy berupa Alat Ukur Universal sebesar Rp. 49.128.600; Pengadaan Meubelair Rp. 98.889.900 (berupa Meja Kerja Besi 1 Buah sebesar Rp. 13.828.380, 12 Buah Kursi Besi/Metal 12 Buah sebesar Rp. 37.145.040, Kursi Kayu 12 Buah sebesar Rp. 13.546.440, Sofa 4 Buah sebesar Rp. 25.046.040, serta Meja Rapat 2 Buah sebesar Rp. 9.324.000); Pengadaan Peralatan Inspektur/Pengawasan



Rp. 265.318.527 (berupa Laptop 13 Buah sebesar Rp. 147.553.965, PC Unit 6 Buah sebesar Rp. 90.514.062, dan Printer 10 Buah sebesar Rp. 27.250.500) serta Pengadaan Peralatan Inspektur/Pengawasan lainnya berupa Printer 3 Buah sebesar Rp. 8.658.000, Laser Range Finder 3 Buah sebesar Rp. 13.619.700, dan Speed Gun Detector 2 Buah sebesar Rp. 12.332.100.

Terdapat Pengadaan lain berupa Alat Uji Mutu Foam Rp. 668.604.060 (berupa pengadaan Portable AC 3 buah sebesar Rp. 46.303.650, AC Split 1 Buah sebesar Rp. 5.133.750, Audio Mixing 1 Buah sebesar Rp. 11.100.000, MIC Wireless 3 Buah sebesar Rp. 23.327.760, Video Monitor 2 Buah sebesar Rp. 64.779.600, Drone 1 Buah sebesar Rp. 93.795.000, Mesin Pembuat ID Card 2 Buah sebesar Rp. 188.700.000, Ransel Breathing 1 Buah sebesar Rp. 29.748.000, Compressor Breathing 1 Buah sebesar Rp. 171.606.000, Message Chair 1 Buah sebesar Rp. 34.110.300).

Sedangkan mutasi kurang Peralatan dan Mesin tidak ada.

Gedung dan

Bangunan

Rp.

53.451.311.896

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 53.451.311.896 dan Rp. 53.451.311.896. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	53.451.311.896
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	13.138.536.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(13.138.536.000)
Saldo per 31 Desember 2025	53.451.311.896
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(10.029.730.083)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	43.421.581.813

Nilai mutasi tambah berasal dari Reklasifikasi Masuk senilai Rp. 13.138.536.000 berupa Rumah Negara Gol. II Tipe C dan E senilai Rp. 3.189.850.000 dan Rp. 5.049.850.000 serta Flat/Rumah Susun Permanen senilai Rp. 4.898.836.000. Sedangkan Nilai Mutasi Keluar berasal dari Reklasifikasi Keluar senilai Rp. 13.138.536.000 berupa Rumah Negara Gol. II Tipe B senilai Rp. 3.189.850.000, Rumah Negara Gol. II Tipe C senilai Rp. 151.014.000, Rumah Negara Gol. II Tipe E senilai Rp. 4.898.836.000, serta Flat/Rumah Susun Permanen senilai Rp. 4.898.836.000.

*Jalan,
Jaringan dan
Irigasi
Rp.
1.105.102.330*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.105.102.330 dan Rp. 1.105.102.330. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.105.102.330
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.105.102.330
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(499.584.837)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	605.517.493

Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan.

Aset Tetap

Lainnya

Rp.

1.899.130.86

4

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 1.899.130.864 dan Rp. 1.899.130.864. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per tanggal pelaporan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.899.130.864
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.899.130.864
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.899.130.864

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp. 0

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.



Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp.

60.470.367.31

1

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. 60.470.367.311 dan Rp. 58.111.872.797. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	52.388.100.989	(49.303.999.728)	3.084.101.261
2	Gedung dan Banguna	53.451.311.896	(10.648.556.823)	42.802.755.073
3	Jalan, Irigasi dan Jarin	1.105.102.330	(517.810.760)	587.291.570
4	Aset Tetap Lainnya	1.899.130.864	-	1.899.130.864
Akumulasi Penyusutan		108.843.646.079	(60.470.367.311)	48.373.278.768

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Properti

Investasi Rp.

134.834.394.8

00

C.22 Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 134.834.394.800 dan Rp. 134.834.394.800.

Sesuai PSAP 17 (Par 4) Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset, dan tidak untuk :

1.digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau



2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Properti Investasi hanya jika biaya perolehan dapat diukur dengan andal dan manfaat ekonomi mengalir ke entitas. Adapun rincian Properti Investasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. KLN	134.834.394.800
Jumlah		134.834.394.800

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga Rp. 0*

C.23 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp 0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.		-
Jumlah		-

*Aset Tak
Berwujud Rp.
1.339.219.000*

C.24 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 1.339.219.000 dan Rp. 1.339.219.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III berupa *software* yang digunakan untuk



menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.339.219.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.339.219.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	1.339.219.000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2025

Uraian	Nilai Perolehan
Software Pelayanan PAS	0
Software Komputer	1.339.219.000
Jumlah	1.339.219.000

*Aset Lain-
Lain Rp. 0*

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-



Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
1.339.219.000*

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. 1.339.219.000 dan Rp. 1.339.219.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	1.339.219.000	1.339.219.000	0
Jumlah	1.339.219.000	1.339.219.000	0
Aset Lain-lain	-	-	0
Jumlah	1.339.219.000	1.339.219.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp. 0*

C.27 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP)



yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada Pihak
Ketiga
Rp. 0*

C.28 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	TA. 2023	TA. 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar merupakan utang yang timbul karena terutangnya pembayaran belanja gaji pegawai bulan September Tahun 2025 sebesar Rp. 0. Beban Barang yang Masih Harus Dibayar berasal transaksi belanja barang yang belum terbit SP2D pada saat tanggal pelaporan yaitu sebesar Rp. 0.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.
42.649.838.1
79*

C.29 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.649.838.179 dan Rp. 907.430.549. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun



barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa atas sewa tanah, gedung, dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah Pend Di Terima Di Muka
- PT. Pertamina Patra Niaga (NTPN 1B72E3CIEOUBRQS9)	287.590.700
- PT. Mawaddah Angkasa Prima Indonesia (NTPN 3382848VV5S1R90O)	1.962.944
- PT. Kaaf Kreasi Indonesia (NTPN E33EB7QLUP9DJP5B)	15.648.649
- Dharma Wanita Persatuan (NTPN E93F16U8EUJTC8BH)	-
- PT. Angkasa Pura Indonesia (NTPN BCDFE6U8F7QMJ6E4)	42.293.253.323
- PT. Indonesia Comnets Plus (NTPN FA2B76U8F80IO4FL)	17.210.000
- PT. Widar Menara Abadi (NTPN 8DAC155DFIS8R55A)	1.441.417
- PT. Widar Menara Abadi (NTPN 213532G503GKU1Q)	2.745.833
- PT. Bank Mandiri (NTPN 634811JNG8UMVA27)	29.985.313
Total	42.649.838.179

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp. 0*

C.30 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga yang belum dilakukan proses pengajuan dokumen pencairan dana atau Surat Perintah Membayar (SPM). Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :



Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	TA. 2024	TA. 2023
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp.

14.748.013.27

2.824

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.748.013.272.824 dan Rp. 14.790.387.728.274. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



Pendapatan

PNBP Rp.

23.139.865.229

D.PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 23.139.865.229 dan Rp. 3.071.800.148. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 653,29%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.032.439.607	7.266.207	275593,21
Pendapatan KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	414.752.678	402.828.941	2,96
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	189.832.944	-	0,00
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2.282.790.000	2.480.145.000	(7,96)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	220.050.000	181.600.000	21,17
Jumlah	23.139.865.229	3.071.840.148	653,29

Terdapat perbedaan saldo Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Tahun 2025 antara LRA dan LO terlihat pada tabel berikut:

URAIAN	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.032.439.607	61.774.847.237	(41.742.407.630)
Jumlah	20.032.439.607	61.774.847.237	(41.742.407.630)

Selisih sebesar Rp. 41.742.407.630 terjadi karena adanya jurnal penyesuaian atas pengakuan pendapatan diterima di muka di tahun 2025 yakni sebesar Rp. 42.649.838.179 dan jurnal balik atas pengakuan pendapatan diterima di muka di tahun 2024 sebesar Rp. 907.430.549.



Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp.

27.625.328.448

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.625.328.448 dan Rp. 24.498.297.331. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	8.517.149.920	8.051.636.849	5,78
Beban Pembulatan Gaji PNS	115.912	120.675	(3,95)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	547.168.090	517.483.810	5,74
Beban Tunj. Anak PNS	176.474.566	168.413.220	4,79
Beban Tunj. Struktural PNS	106.195.000	106.750.000	(0,52)
Beban Tunj. Fungsional PNS	7.560.000	9.000.000	(16,00)
Beban Tunj. PPh PNS	46.097.956	59.273.802	(22,23)
Beban Tunj. Beras PNS	451.900.800	435.839.720	3,69
Beban Uang Makan PNS	1.150.298.000	1.002.723.000	14,72
Beban Tunjangan Umum PNS	419.700.000	405.195.000	3,58
Beban Gaji Pokok PPPK	283.257.100	47.816.900	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.124	888	-
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	14.971.810	-	-
Beban Tunj. Anak PPPK	4.339.874	-	-
Beban Tunj. Fungsional PPPK	7.560.000	8.100.000	-
Beban Tunj. Beras PPPK	15.425.460	1.086.300	-
Beban Uang Makan PPPK	64.439.000	8.399.000	-
Beban Tunjangan Umum PPPK	14.645.000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	15.440.031.937	13.606.731.817	13,47
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	357.993.899	69.726.350	-
Jumlah	27.625.328.448	24.498.297.331	12,76



Beban

Persediaan

Rp.

217.890.830

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 217.890.830 dan Rp. 401.729.721. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	217.890.830	373.719.148	(41,70)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	28.010.573	0,00
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0,00
Jumlah	217.890.830	401.729.721	(45,76)

Beban Barang

dan Jasa Rp.

6.580.278.399

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pasda 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp. 6.580.278.399 dan Rp. 10.868.746.698. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.521.737.447	2.741.087.559	(8,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	37.990.538	32.973.105	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.918.700	11.687.500	1,98
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	199.080.000	151.909.400	31,05
Beban Barang Operasional Lainnya	1.081.603.263	1.236.039.978	(12,49)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	0	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	208.716.660	(100,00)
Beban Langganan Listrik	1.098.042.126	1.501.626.677	(26,88)
Beban Langganan Telepon	2.249.855	8.538.937	(73,65)
Beban Langganan Air	94.882.062	122.698.293	(22,67)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	246.345.921	363.443.631	(32,22)
Beban Jasa Konsultan	-	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	299.966.400	145.000.000	0,00
Beban Sewa	240.096.454	1.157.819.277	(79,26)
Beban Jasa Profesi	127.300.000	98.970.000	28,62
Beban Bahan	616.045.633	3.079.165.681	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	3.020.000	9.070.000	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Jumlah	6.580.278.399	10.868.746.698	(39,46)

Beban

Pemeliharaan

Rp.

4.342.593.923

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.342.593.923 dan Rp. 3.809.135.782. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.751.823.669	1.637.485.977	68,05
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.352.046.030	1.835.132.204	(26,32)
Beban Pemeliharaan Jaringan	49.594.800	191.448.971	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	189.129.424	144.038.550	31,30
Belanja Persediaan Suku Cadang	-	1.030.080	(100,00)
Jumlah	4.342.593.923	3.809.135.782	14,00

Beban

Perjalanan

Dinas Rp.

8.303.901.397

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.303.901.397 dan Rp. 11.953.684.988. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7.206.164.749	9.628.085.342	(25,15)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	199.904.200	328.300.000	(39,11)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Ko	-	1.600.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	897.832.448	1.979.827.716	(54,65)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	15.871.930	(100,00)
Jumlah	8.303.901.397	11.953.684.988	(30,53)

*Beban Barang
untuk*

Diserahkan

kepada

Masyarakat

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0



Rp. 0

dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2024	TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Beban

D.8 Beban Bantuan Sosial

Bantuan

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Sosial Rp. 0

Beban

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.358.494.514 dan Rp. 2.790.059.093. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan

dan

Amortisasi Rp.

2.358.494.514



manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.084.389.231	1.278.509.650	(15,18)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.237.653.438	1.475.097.598	(16,10)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	36.451.845	36.451.845	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.358.494.514	2.790.059.093	(15,47)
Beban Amortisasi Software	-	-	0,00
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.358.494.514	2.790.059.093	(15,47)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00



Surplus

Penjualan

Aset Non

Lancar Rp. 0

D.11 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset

Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 15.312.344. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset adalah selisih antara nilai tercatat (nilai buku) suatu aset tetap dengan harga jual atau nilai realisasi aset tersebut pada saat dilepas (dijual, disumbangkan, dihentikan penggunaannya, atau ditransfer). Pos Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pelepasan Aset TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	15.312.344	0,00
Beban Pelepasan Aset	-	-	0,00
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0	15.312.344	(100,00)

Surplus

(Defisit) dari

Kegiatan Non

Operasional

Lainnya Rp.

136.611.725

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 136.611.725 dan Rp. 101.455.898.



*Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Beban Pegawai TAYL	3.124	0	0,00
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	136.608.601	101.455.898	34,65
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	136.611.725	101.455.898	34,65

Pos Luar

Biasa Rp. 0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas	-	-	0,00
Beban Persediaan	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

***Rp.
14.790.387.728.
274***

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.790.387.728.274 dan Rp. 14.804.933.979.820.

Defisit LO

***(Rp.
26.152.010.557)***

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp. 26.152.010.557) dan (Rp. 51.133.085.223). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp. 0

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

***Rp.
206.379.030***

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 206.379.030 dan Rp. 0. Koreksi Nilai Persediaan muncul dari jurnal umum sebagai langkah tindak lanjut atas temuan Pemeriksaan Interim BPK Tahun 2025



terkait pengelolaan persediaan dimana pada awalnya terdapat persediaan bahan pencetakan izin masuk bandar udara (PAS) yang tidak dilakukan inventarisasi fisik atas sisa persediaan tersebut karena pengadaannya tidak menggunakan MAK belanja persediaan. Sehingga dengan adanya jurnal umum tersebut, maka temuan Pemeriksaan BPK terkait persediaan telah diselesaikan.

Selisih

Revaluasi

Aset Tetap Rp.

0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi Rp.

0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.



**Koreksi Lain-
Lain Rp. 0**

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

**Transaksi
Antar Entitas
(Rp.
16.428.823.923
)**

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp. 16.428.823.923) dan Rp. 36.586.833.677. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(65.018.884.584)
Ditagikan ke Entitas Lain	48.143.757.144
Transfer Masuk	446.303.517
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(16.428.823.923)



Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp. 65.018.884.584) sedangkan DKEL sebesar Rp. 48.143.757.144.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 446.303.517 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Tanah	Stasiun Meteorologi Juanda	446.303.517
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah			446.303.517

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0. Dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang tahun 2025. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan



transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp. 0. Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-		Rp -
2	-		Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp.

14.748.013.2

72.824

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.748.013.272.824 dan Rp. 14.790.387.728.274.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN - KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun 2025 telah dilakukan Pemeriksaan Interim BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 serta telah terbit Surat Ketua Tim VI BPK RI nomor 11/S/T-VI/LK.Kemenhub.25/12/2025 Tanggal 22 Desember 2025 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Interim LK TA 2025 Tim VI, dimana pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III terdapat temuan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan persediaan belum tertib sehingga berpotensi saldo persediaan kurang saji; dan
- 2) penatausahaan aset tetap dan properti investasi belum memadai.

Menindaklanjuti surat tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III telah menerbitkan surat Nomor KU.501/900/KOBU.III/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Penyampaian Tanggapan Instansi terhadap Konsep temuan Pemeriksaan Interim BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang menyampaikan bentuk langkah tindak lanjut yang dilaksanakan (data dukung terlampir).

DATA DUKUNG



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III**

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUN 2025 AUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III
Kode dan Nama UAPPAW : (022050500KD) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III
Kode dan Nama Eselon 1 : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Kode dan Nama K/L : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
	Seharusnya		
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
	Seharusnya		
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
	Seharusnya		
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
	Seharusnya		
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
	Seharusnya		
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN <i>(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	-	-	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya

	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	-	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	-	-	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	-	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	-	-	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	-	-	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya

	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	-	-	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	V		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	V		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk	V		
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya

2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset". Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V	-	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	-	-	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	-	-	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	-	-	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
- Pada Tahun 2025 telah dilakukan Pemeriksaan Interim BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 serta telah terbit Surat Ketua Tim VI BPK RI nomor 11/S/T-VI/LK.Kemenhub.25/12/2025 Tanggal 22 Desember 2025 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Interim LK TA 2025 Tim VI, dimana pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III terdapat temuan sebagai berikut: 1) Pengelolaan persediaan belum tertib sehingga berpotensi saldo persediaan kurang saji; dan 2) penatausahaan aset tetap dan properti investasi belum memadai. Menindaklanjuti surat tersebut, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III telah menerbitkan surat Nomor KU.501/900/KOBU.III/2025 tanggal 31 Desember 2025 Perihal Penyampaian Tanggapan Instansi terhadap Konsep temuan Pemeriksaan Interim BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang menyampaikan bentuk langkah tindak lanjut yang dilaksanakan (data dukung terlampir).				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  Agusmono NIP 19690831 199103 1 001		Sidoarjo, 4 Mei 2026 Penelaah,  Mada Choryza P NIP 19860503 200912 1 010		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 465657 - KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 22/01/26 2:06
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	61,707,284,000	61,707,284,000	0
2	Belanja	48,146,070,949	48,146,070,949	0
3	Pengembalian Belanja	-2,313,805	-2,313,805	0
4	Estimasi Pendapatan	3,964,353,000	3,964,353,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	65,018,884,584	65,018,884,584	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026





DATA REKAP REKONSILIASI SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-14

NO	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Pagu Belanja	61.707.284.000	61.707.284.000	0
2	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Belanja	48.146.070.949	48.146.070.949	0
3	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Pengembalian Belanja	-2.313.805	-2.313.805	0
4	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Estimasi Pendapatan	3.964.353.000	3.964.353.000	0
5	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Pendapatan Bukan Pajak	65.018.884.584	65.018.884.584	0
6	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	02205	465657	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III 465657

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 1:52 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,964,353,000	65,018,884,584	61,054,531,584	1640.09	3,846,125,000	4,095,998,939	249,873,939	106.5
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,964,353,000	65,018,884,584	61,054,531,584	1640.09	3,846,125,000	4,095,998,939	249,873,939	106.5
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,964,353,000	65,018,884,584	61,054,531,584	1640.09	3,846,125,000	4,095,998,939	249,873,939	106.5
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	61,707,284,000	48,143,757,144	(13,563,526,856)	78.02	55,105,797,000	52,771,702,528	(2,334,094,472)	95.76
1. Belanja Pegawai	27,978,640,000	27,625,328,448	(353,311,552)	98.74	24,638,557,000	24,498,297,331	(140,259,669)	99.43
2. Belanja Barang	32,608,844,000	19,401,877,809	(13,206,966,191)	59.50	29,245,286,000	27,058,467,420	(2,186,818,580)	92.52
3. Belanja Modal	1,119,800,000	1,116,550,887	(3,249,113)	99.71	1,221,954,000	1,214,937,777	(7,016,223)	99.43
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III 465657

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 1:52 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	61,707,284,000	48,143,757,144	(13,563,526,856)	78.02	55,105,797,000	52,771,702,528	(2,334,094,472)	95.76
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Sidoarjo, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTONO
196908311991031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:52 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	204,411,718	40,819,428	163,592,290	400.77
JUMLAH ASET LANCAR	204,411,718	40,819,428	163,592,290	400.77
ASET TETAP				
Tanah	14,607,251,025,717	14,606,804,722,200	446,303,517	0.00
Peralatan dan Mesin	52,388,100,989	51,271,550,102	1,116,550,887	2.18
Gedung dan Bangunan	53,451,311,896	53,451,311,896	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,105,102,330	1,105,102,330	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,899,130,864	1,899,130,864	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(60,470,367,311)	(58,111,872,797)	(2,358,494,514)	4.06
JUMLAH ASET TETAP	14,655,624,304,485	14,656,419,944,595	(795,640,110)	(0.01)
Properti Investasi				
Properti Investasi	134,834,394,800	134,834,394,800	0	0.00
JUMLAH Properti Investasi	134,834,394,800	134,834,394,800	0	0.00
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,339,219,000	1,339,219,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,339,219,000)	(1,339,219,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	14,790,663,111,003	14,791,295,158,823	(632,047,820)	(0.00)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima Dimuka	42,649,838,179	907,430,549	41,742,407,630	4,600.07
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42,649,838,179	907,430,549	41,742,407,630	4,600.07
JUMLAH KEWAJIBAN	42,649,838,179	907,430,549	41,742,407,630	4,600.07
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,748,013,272,824	14,790,387,728,274	(42,374,455,450)	(0.29)
JUMLAH EKUITAS	14,748,013,272,824	14,790,387,728,274	(42,374,455,450)	(0.29)
JUMLAH EKUITAS	14,748,013,272,824	14,790,387,728,274	(42,374,455,450)	(0.29)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,790,663,111,003	14,791,295,158,823	(632,047,820)	(0.00)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:52 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Sidoarjo, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTONO

196908311991031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 1:49 PM
Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,139,865,229	3,071,800,148	20,068,065,081	653.3
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	23,139,865,229	3,071,800,148	20,068,065,081	653.3
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	23,139,865,229	3,071,800,148	20,068,065,081	653.3
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	27,625,328,448	24,498,297,331	3,127,031,117	12.764
Beban Persediaan	217,890,830	401,729,721	(183,838,891)	(45.762)
Beban Barang dan Jasa	6,580,278,399	10,868,746,698	(4,288,468,299)	(39.457)
Beban Pemeliharaan	4,342,593,923	3,809,135,782	533,458,141	14.005
Beban Perjalanan Dinas	8,303,901,397	11,953,684,988	(3,649,783,591)	(30.533)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 1:49 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,358,494,514	2,790,059,093	(431,564,579)	(15.468)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	49,428,487,511	54,321,653,613	(4,893,166,102)	(9.008)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(26,288,622,282)	(51,249,853,465)	24,961,231,183	(48.705)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	15,312,344	(15,312,344)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	15,312,344	(15,312,344)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	136,611,725	101,455,898	35,155,827	34.651
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	136,611,725	101,455,898	35,155,827	34.651
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	136,611,725	116,768,242	19,843,483	16.994
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(26,152,010,557)	(51,133,085,223)	24,981,074,666	(48.855)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(26,152,010,557)	(51,133,085,223)	24,981,074,666	(48.855)

Keterangan :

FINAL

Sidoarjo, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTONO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:51 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,790,387,728,274	14,804,933,979,820	(14,546,251,546)	(0.1)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(26,152,010,557)	(51,133,085,223)	24,981,074,666	(48.86)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	206,379,030	0	206,379,030	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	206,379,030	0	206,379,030	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(16,428,823,923)	36,586,833,677	(53,015,657,600)	(144.9)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(42,374,455,450)	(14,546,251,546)	(27,828,203,904)	191.31
EKUITAS AKHIR	14,748,013,272,824	14,790,387,728,274	(42,374,455,450)	(0.29)

Keterangan :

FINAL

Sidoarjo, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTONO

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	203,794,984	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	616,734	0
0.0	131111	Tanah	14,607,251,025,717	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	52,388,100,989	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	53,451,311,896	0
0.0	134112	Irigasi	213,802,000	0
0.0	134113	Jaringan	891,300,330	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,899,130,864	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	49,303,999,728
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,648,556,823
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	57,305,589
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	460,505,171
0.0	138311	Properti Investasi	134,834,394,800	0
0.0	162151	Software	1,339,219,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,339,219,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	42,649,838,179
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	48,143,757,144
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	65,018,884,584	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	446,303,517
0.0	391111	Ekuitas	0	14,790,387,728,274
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	206,379,030
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,032,439,607
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	414,752,678
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	189,832,944
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	2,282,790,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	220,050,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,124
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	136,608,601
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,517,149,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	115,912	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	547,168,090	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	176,474,566	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	106,195,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,560,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	46,097,956	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	451,900,800	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,150,298,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:53 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	419,700,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	283,257,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,124	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,971,810	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,339,874	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,425,460	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	64,439,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	14,645,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	15,440,031,937	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	357,993,899	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,521,737,447	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	37,990,538	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,918,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	199,080,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,081,603,263	0
3.0	521211	Beban Bahan	616,045,633	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,020,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,098,042,126	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,249,855	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	94,882,062	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	246,345,921	0
3.0	522141	Beban Sewa	240,096,454	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	127,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	299,966,400	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,751,823,669	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,352,046,030	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	49,594,800	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7,206,164,749	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	199,904,200	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	897,832,448	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,084,389,231	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,237,653,438	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	6,741,834	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	29,710,011	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	217,890,830	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	189,129,424	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:53 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			14,966,920,069,409	14,966,920,069,409

Keterangan :

FINAL

Sidoarjo, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTONO

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	48,143,757,144
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	65,018,884,584	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	61,774,847,237
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	414,752,678
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	189,832,944
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	2,282,790,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	220,050,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,124
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	136,608,601
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8,517,149,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	116,217	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	547,168,090	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	176,474,566	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	106,195,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,560,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	46,097,956	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	451,900,800	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,150,298,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	419,700,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	283,257,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,124	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,971,810	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,339,874	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,425,460	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	64,439,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	14,645,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	15,440,031,937	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	357,993,899	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,521,737,447	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	37,990,538	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,918,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	199,080,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,081,603,263	0
3.0	521211	Belanja Bahan	616,045,633	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,020,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	364,233,514	0

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (465657) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Tgl Data : 30/04/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 30/04/26 1:53 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,098,042,126	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,249,855	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	94,882,062	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	246,345,921	0
3.0	522141	Belanja Sewa	240,096,454	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	127,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	299,966,400	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,751,823,669	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,352,046,030	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	49,594,800	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,208,478,249	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	199,904,200	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	897,832,448	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,116,550,887	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	305
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,313,500
JUMLAH			113,164,955,533	113,164,955,533

Keterangan :

FINAL

Sidoarjo, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



AGUSTONO

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 465657 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III**

Kode Lap : LRA.P.E.1.1
Tanggal : 30/04/26 1:55 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200,000,000	61,774,847,237	0	61,774,847,237	30887.42
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	414,753,000	414,752,678	0	414,752,678	100
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	189,832,944	0	189,832,944	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	614,753,000	62,379,432,859	0	62,379,432,859	10,147.07
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	3,184,200,000	2,282,790,000	0	2,282,790,000	71.69
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	165,400,000	220,050,000	0	220,050,000	133.04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	3,349,600,000	2,502,840,000	0	2,502,840,000	74.72
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,124	0	3,124	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	136,608,601	0	136,608,601	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	136,611,725	0	136,611,725	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,964,353,000	65,018,884,584	0	65,018,884,584	1,640.09
	JUMLAH PENDAPATAN	3,964,353,000	65,018,884,584	0	65,018,884,584	1,640.09

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 465657
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
JAWA TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/04/26 1:54 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,939,235,000	8,519,768,000	8,517,149,920	0	8,517,149,920	99.97	2,618,080
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	170,000	117,000	116,217	305	115,912	99.07	1,088
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	693,120,000	547,169,000	547,168,090	0	547,168,090	100	910
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	228,210,000	176,475,000	176,474,566	0	176,474,566	100	434
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	149,950,000	106,195,000	106,195,000	0	106,195,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	11,350,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	29,000,000	46,100,000	46,097,956	0	46,097,956	100	2,044
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	628,100,000	451,901,000	451,900,800	0	451,900,800	100	200
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,524,300,000	1,150,700,000	1,150,298,000	0	1,150,298,000	99.97	402,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	746,760,000	419,710,000	419,700,000	0	419,700,000	100	10,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	13,950,195,000	11,425,695,000	11,422,660,549	305	11,422,660,244	99.97	3,034,756
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	42,000,000	283,260,000	283,257,100	0	283,257,100	100	2,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	5,000	4,124	0	4,124	82.48	876
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	15,000,000	14,971,810	0	14,971,810	99.81	28,190
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	4,340,000	4,339,874	0	4,339,874	100	126
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	900,000	15,430,000	15,425,460	0	15,425,460	99.97	4,540
511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,200,000	66,700,000	64,439,000	0	64,439,000	96.61	2,261,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	14,650,000	14,645,000	0	14,645,000	99.97	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	61,665,000	406,945,000	404,642,368	0	404,642,368	99.43	2,302,632
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	14,250,000,000	15,774,000,000	15,440,031,937	0	15,440,031,937	97.88	333,968,063
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	70,000,000	372,000,000	357,993,899	0	357,993,899	96.23	14,006,101
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	14,320,000,000	16,146,000,000	15,798,025,836	0	15,798,025,836	97.84	347,974,164
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	28,331,860,000	27,978,640,000	27,625,328,753	305	27,625,328,448	98.74	353,311,552
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,703,008,000	2,712,576,000	2,521,737,447	0	2,521,737,447	92.96	190,838,553
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	38,000,000	38,000,000	37,990,538	0	37,990,538	99.98	9,462
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	11,918,700	0	11,918,700	99.32	81,300
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	200,664,000	399,744,000	199,080,000	0	199,080,000	49.8	200,664,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	44,176,000	27,806,500	1,081,603,263	0	1,081,603,263	49.5	1,103,260,737

Dokumen ini telah dipandang dan secara elektronik ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 465657
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
JAWA TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 1:54 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,194,848,000	5,347,184,000	3,852,329,948	0	3,852,329,948	72.04	1,494,854,052
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,046,371,000	3,496,651,000	616,045,633	0	616,045,633	17.62	2,880,605,367
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,000,000	15,000,000	3,020,000	0	3,020,000	20.13	11,980,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,061,371,000	3,511,651,000	619,065,633	0	619,065,633	17.63	2,892,585,367
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	460,000,000	626,397,000	364,233,514	0	364,233,514	58.15	262,163,486
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	460,000,000	626,397,000	364,233,514	0	364,233,514	58.15	262,163,486
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,440,000,000	1,098,208,000	1,098,042,126	0	1,098,042,126	99.98	165,874
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	2,352,000	2,249,855	0	2,249,855	95.66	102,145
522113	Belanja Langganan Air	120,000,000	94,920,000	94,882,062	0	94,882,062	99.96	37,938
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	228,000,000	250,920,000	246,345,921	0	246,345,921	98.18	4,574,079
522131	Belanja Jasa Konsultan	703,060,000	703,060,000	0	0	0	0	703,060,000
522141	Belanja Sewa	1,502,395,000	1,466,753,000	240,096,454	0	240,096,454	16.37	1,226,656,546
522151	Belanja Jasa Profesi	579,600,000	638,400,000	127,300,000	0	127,300,000	19.94	511,100,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	831,880,000	368,871,000	299,966,400	0	299,966,400	81.32	68,904,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,416,935,000	4,623,484,000	2,108,882,818	0	2,108,882,818	45.61	2,514,601,182
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,219,912,000	2,756,140,000	2,751,823,669	0	2,751,823,669	99.84	4,316,331
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,646,410,000	1,846,386,000	1,352,046,030	0	1,352,046,030	73.23	494,339,970
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	30,000,000	49,595,000	49,594,800	0	49,594,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,896,322,000	4,652,121,000	4,153,464,499	0	4,153,464,499	89.28	498,656,501
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,605,083,000	10,174,701,000	7,208,478,249	2,313,500	7,206,164,749	70.82	2,968,536,251
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	816,749,000	468,840,000	199,904,200	0	199,904,200	42.64	268,935,800
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	96,560,000	11,360,000	0	0	0	0	11,360,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,397,455,000	3,193,106,000	897,832,448	0	897,832,448	28.12	2,295,273,552
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	14,915,847,000	13,848,007,000	8,306,214,897	2,313,500	8,303,901,397	59.96	5,544,105,603
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	138,960,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	138,960,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	33,084,283,000	32,608,844,000	19,404,197,309	2,313,500	19,401,877,809	59.5	13,206,966,191

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : 465657 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 1:54 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,119,800,000	1,116,550,887	0	1,116,550,887	99.71	3,249,113
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	1,119,800,000	1,116,550,887	0	1,116,550,887	99.71	3,249,113
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,119,800,000	1,116,550,887	0	1,116,550,887	99.71	3,249,113
	JUMLAH BELANJA	61,416,143,000	61,707,284,000	48,146,070,949	2,313,805	48,143,757,144	78.02	13,563,526,856

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 Eselon I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 Wilayah : PROVINSI JAWA TIMUR
 Satuan Kerja : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III
 No. Dokumen : 001/JURNAL PENYESUAIAN
 Tanggal : 31 DESEMBER
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan :

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☒ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	425131 (Pend. Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan)	42.649.838.179	
	K	219211 (Pend. Sewa Diterima Di Muka)		42.649.838.179
2	D			
	K			
3	D			
	K			

Uraian :

Mencatat Pendapatan Diterima Di Muka di Tahun 2025

Dibuat oleh :
 Petugas Akuntansi

Disetujui oleh :
 KPA

Mada Choryza P
 Tanggal : 31 Desember 2025

Agustono
 Tanggal : 31 Desember 2025

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Eselon I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Wilayah : PROVINSI JAWA TIMUR
Satuan Kerja : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III
No. Dokumen : 001 dan 002/JURNAL UMUM
Tanggal : 31 DESEMBER
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan :

JURNAL UMUM :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	491429 (Pend. Perolehan Aset Lainnya)	206.379.030	
	K	391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)		206.379.030
2	D	391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)	206.379.030	
	K	391113 (Koreksi Nilai Persediaan)		206.379.030
3	D			
	K			

Uraian :

Koreksi atas kesalahan catat Jurnal Umum 001 guna mencatat penyesuaian atas Temuan BPK dimana ada pengadaan persediaan bahan pencetakan izin masuk bandara (PAS) namun tidak menggunakan MAK Belanja Persediaan.

Dibuat oleh :
Petugas Akuntansi

Mada Choryza P
Tanggal : 31 Desember 2025

Disetujui oleh :
KPA

Agustono
Tanggal : 31 Desember 2025

Gedung "Airport Authority"
Bandar Udara internasional Juanda Surabaya
Sedati - Sidoarjo - Jawa Timur
Kode Pos 61253

(031) 8677604

0889-9090-0003 (Layanan Pengaduan)

otban_wil3@kemenhub.go.id

Otoritas Bandar Udara Wilayah III

@Otban3Surabaya

Otban Wil Tiga Kantor



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

